

BAB I

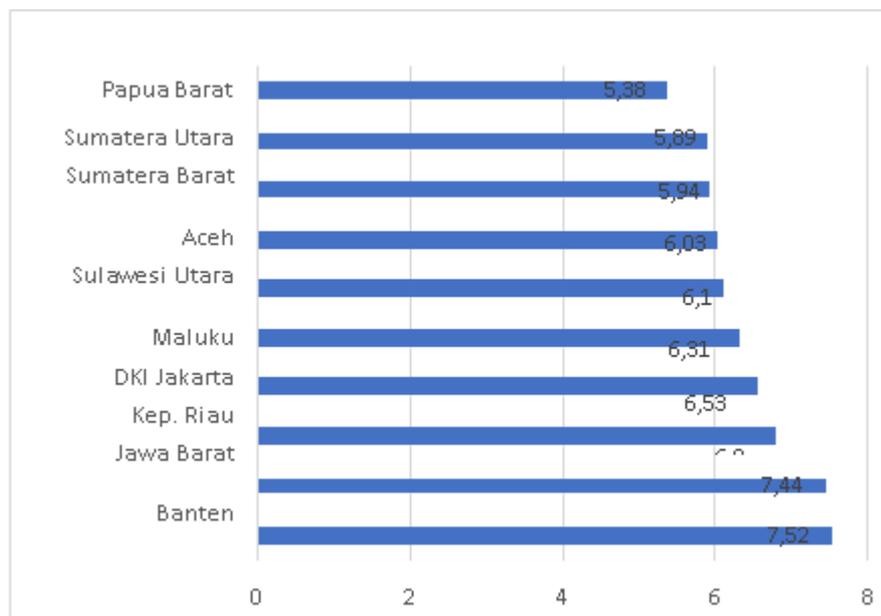
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan padat. Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan berada di urutan ke empat setelah negara Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Berdasarkan *Worldometers*, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 277,7 juta jiwa per bulan Juli 2023. Namun, Tingkat perkembangan jumlah penduduk yang tinggi tidak selalu membawa dampak positif bagi suatu negara, bisa saja tingkat perkembangan jumlah penduduk yang tinggi tetapi tidak diiringi dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan pembangunan ekonomi, karena bisa menjadi beban keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara tersebut.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia semakin lama semakin banyak, begitu juga dengan pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten. Pertambahan jumlah penduduk tentu mengakibatkan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Jumlah penduduk yang terlalu banyak dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Hal ini yang terjadi akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menyerap dan menampung tenaga kerja yang ditawarkan, hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Di Indonesia jumlah pengangguran masih terus tinggi

setiap tahunnya yang artinya masih banyak angkatan yang belum bekerja. Pengangguran yang terus bertambah tentu saja juga ikut meningkatkan masalah dan menjadi beban di dalam perekonomian yang ikut memberikan dampak penurunan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Gambar 1.1 10 Provinsi di Indonesia yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi Tahun 2023 (Persen)

Pada Gambar 1.1 Berdasarkan data BPS, Provinsi Banten termasuk ke dalam daftar 10 daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi peringkat pertama yaitu sebesar 7,52 persen. Hal ini terjadi karena terdapat masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat luas dan kompleks serta berkaitan dengan kesempatan kerja. Dengan tersedianya kesempatan kerja, maka masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Maka dari itu, dalam proses pembangunan ekonomi, suatu wilayah dituntut agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja.

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya jumlah pengangguran, dimana diketahui pengangguran merupakan masalah yang menghambat proses pembangunan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia sebagai penunjang prosesnya karena berperan sebagai pelaku utama dalam menjalankan pembangunan. Pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, membuka lapangan kerja, memberikan pendapatan secara adil dan rata di setiap daerah (Todaro & Smith, 2009). Namun masih banyak kesenjangan dalam penerapannya. Tujuan inti dari proses pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010).

Menurut Kuncoro, Penyerapan Tenaga kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penyerapan tenaga kerja berhubungan dengan kesempatan kerja. Kesempatan kerja menunjukkan berapa orang yang telah atau dapat tertampung dalam suatu perusahaan melalui permintaan tenaga kerja. Kesempatan kerja dapat diwujudkan dengan tersedianya lapangan kerja dan banyaknya permintaan tenaga

kerja yang memungkinkan terjadinya penyerapan tenaga kerja yang ditandai dengan banyaknya tenaga kerja terserap (bekerja). Masalah penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu masalah makro yang dihadapi dalam suatu perekonomian. Hal tersebut bisa dilihat dari fenomena keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda.

Tabel 1.1 Data Orang yang Bekerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Jiwa)

Kab/Kota	Orang yang bekerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Pandeglang	493.630	483.947	481.092	509.778	500.022
Kab Lebak	575.820	553.290	596.379	585.592	581.080
Kab. Tangerang	1.521.893	1.651.254	1.596.938	1.675.211	1.822.512
Kab. Serang	584.722	618.820	614.320	634.825	643.277
Kota Tangerang	972.482	1.026.031	1.030.255	1.038.183	1.106.436
Kota Cilegon	183.017	182.473	178.699	185.593	211.688
Kota Serang	279.182	285.989	292.638	290.045	312.198
Kota Tangerang Selatan	740.364	750.650	761.851	779.117	763.405
Provinsi Banten	5.351.110	5.552.454	5.552.172	5.698.344	5.940.618

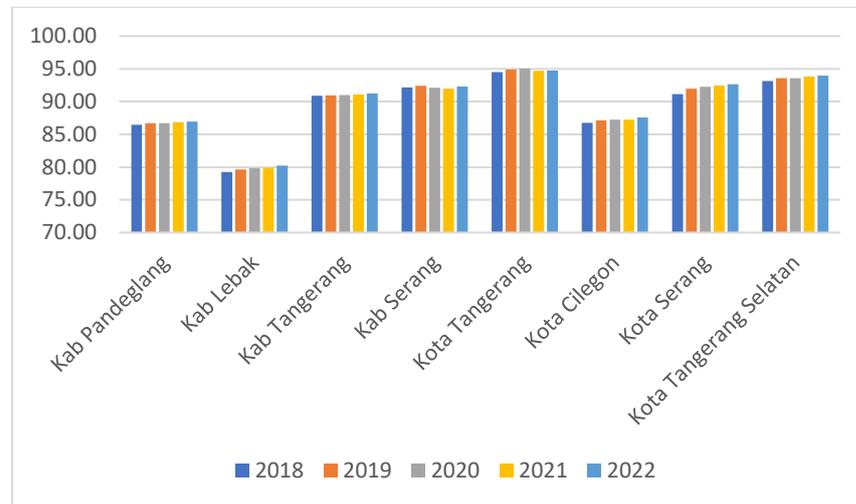
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

Dilihat pada Tabel 1.1. Berdasarkan data BPS, penyerapan tenaga kerja terbanyak di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Tangerang dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya. Tahun 2018 orang yang bekerja di Kabupaten tangerang sebanyak 1.521.893 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.651.254

jiwa, pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya pandemi covid-19 menjadi 1.596.938 jiwa, meningkat kembali tahun 2021 sebanyak 1.675.211 jiwa, tahun 2022 sebanyak 1.822.512 jiwa dan menurun di tahun terakhir yaitu tahun 2023 menjadi 1.573.582 jiwa. Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki kawasan industri terbanyak maka dari itu dijadikan tujuan migrasi oleh penduduk untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan yang memiliki penyerapan tenaga kerja terendah di Provinsi Banten yaitu Kota Cilegon jauh dibandingkan dengan Kab/Kota. Tahun 2018 orang yang bekerja di Kota Cilegon sebanyak 183.017 jiwa, tahun 2019 sebanyak 182.473 jiwa, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 178.699 jiwa, tahun 2021 meningkat sebanyak 185.593 jiwa, tahun 2022 sebanyak 211.688 jiwa, dan pada tahun 2023 menurun menjadi 192.157 jiwa.

Dalam penyerapan tenaga kerja seringkali terjadinya ketimpangan gender (Rita Diana, 2015). Ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan akan berdampak pada ekonomi Karena dalam dunia kerja peran antar laki-laki dan perempuan sering dibedakan. Maka dari itu, seringkali diskriminasi terhadap perempuan yang dianggap lemah dan lebih pantas mengurus pekerjaan rumah tangga. Gender merupakan istilah untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Perbedaan Gender ini merupakan perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan, baik dari sisi tanggung jawab, kedudukan serta pembagian kerja di antara keduanya. Akibat dari struktur sosial dan persepsi masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki membuat kondisi yang tidak adil yaitu ketimpangan gender (BPS, 2022). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu indikator yang dipakai untuk mengetahui capaian pembangunan manusia yang dilihat dari

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan berdasarkan perhitungan capaian antara laki-laki dan perempuan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

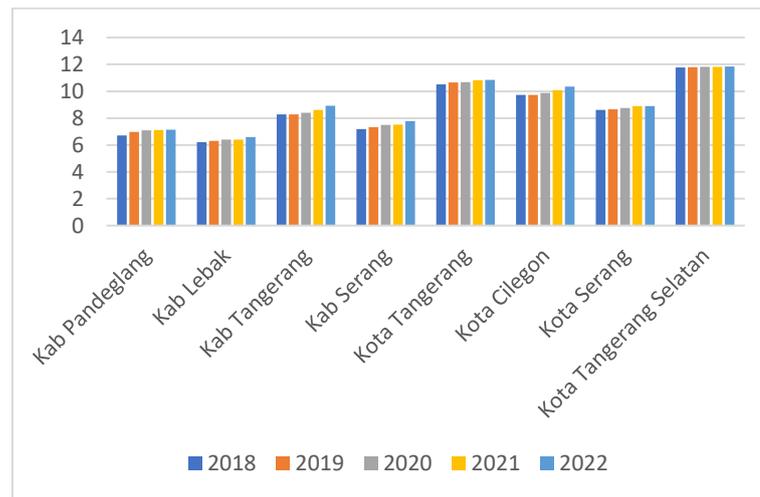
Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Persen)

Dilihat pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten/Kota Provinsi Banten dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Gender tertinggi ada pada Kota Tangerang sebesar 94,66% dan yang kedua adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 93,48%. Meskipun dalam dunia kerja masih sering terjadi diskriminasi terhadap perempuan, di mana laki-laki merasa dirugikan ketika perempuan berada dalam suatu kondisi yang sama dalam dunia kerja. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten juga mengalami peningkatan dalam 6 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan ketimpangan gender masih tinggi di Provinsi Banten (BPS, 2022).

Indikator lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah Tingkat Pendidikan (Elga Brilian, 2016). Penyerapan tenaga kerja biasanya didasarkan pada hal ini kualitas tenaga kerja yang tercermin pada tingkat pendidikannya. Pendidikan akan mempengaruhi produktivitas kerja yang dimiliki karena Pendidikan merupakan modal untuk menciptakan produktivitas masyarakat yang tinggi pada suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kemampuan negara berkembang dalam menciptakan pengetahuan baru, menggunakan teknologi modern, menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan menghasilkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. Jika hal ini terjadi, diharapkan kualitas dan kuantitas output yang dihasilkan akan meningkat. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang mencatat tingkat pendidikan yang rendah di Indonesia. Selain itu, tidak hanya rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhinya, namun banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak memasuki dunia kerja karena kurangnya kualifikasi atau keterampilan dan pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan kehidupan kerja. Keinginan para pencari kerja bahwa tingkat kesejahteraan sosial tidak merata (Devanto, 2015).

Pendidikan (formal) merupakan cara tepat untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi kualitas tenaga kerja. Tingginya kualitas tenaga kerja yang terlibat aktif dalam perekonomian akan meningkatkan *output* yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Sirilius, 2017). Dengan demikian sekurangnya pendidikan perlu diperhatikan oleh Pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian

untuk melihat kualitas pendidikan masyarakat suatu daerah bisa dilihat melalui data Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2018-2022.



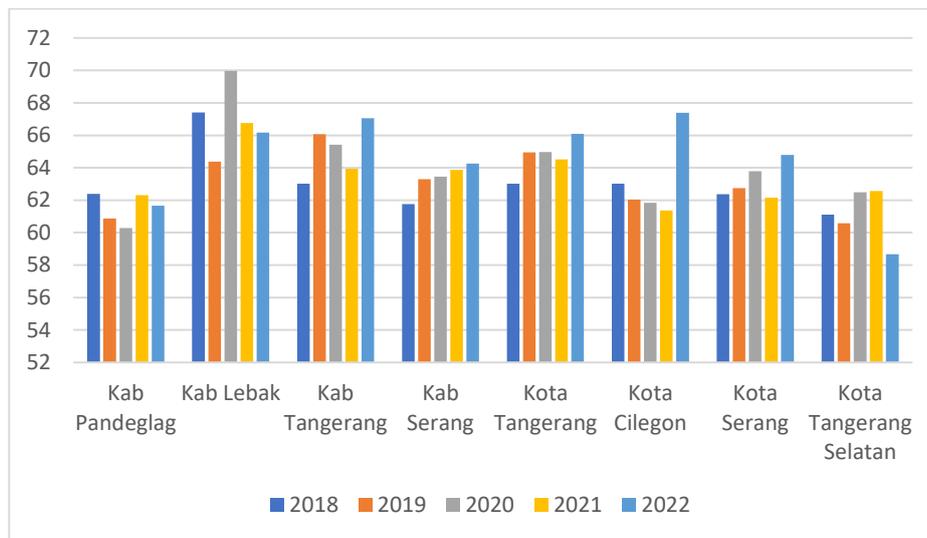
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Gambar 1.3 Persentase Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Tahun)

Berdasarkan Gambar 1.3 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, perkembangan tingkat pendidikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten rata-rata lama bersekolah masih belum merata dan terdapat ketimpangan. Dilihat dari Kabupaten Lebak yang memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dan cukup jauh dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten, khususnya Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan faktor kemiskinan mungkin menjadi faktor penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lebak. Rata-rata total tahun yang dihabiskan di sekolah penduduk Provinsi Banten tahun 2018-2022 terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Rata-rata penduduk Provinsi Banten telah menempuh pendidikan selama 8,62 tahun per tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 yaitu selama 8,74

tahun. Pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Angka ini menjadi 8,89 tahun per tahun 2020. Pada tahun 2021 naik menjadi 8,89 dan pada tahun 2022 menjadi 9,12 tahun. Peningkatan tersebut dapat dikaitkan dengan fakta bahwa semakin banyak orang yang menyadari nilai pendidikan dan memanfaatkan insiatif pemerintah seperti wajib belajar 12 tahun. Melihat perkembangan pendidikan penduduk Banten yang terus meningkat, maka seharusnya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten pun akan semakin meningkat.

Faktor lainnya yang dapat memberi pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah Nilai Produksi (Atria Tiffany, et.al 2024). Jumlah produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri. Untuk meningkatkan output, diperlukan peningkatan input yang dalam hal ini tenaga kerja. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja semakin tinggi pula jumlah produksi, begitu juga sebaliknya (Sumarsono, 2003 dalam Fadliilah dan Atmanti, 2012). Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, akan berpengaruh apabila permintaan hasil produksi barang perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya (Sumarsono, 2003).



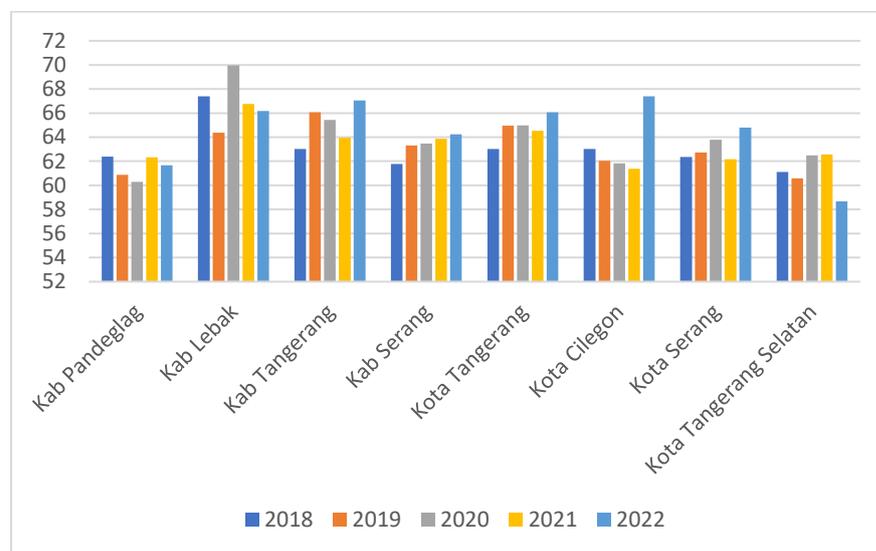
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

Gambar 1.4 Nilai Produksi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Triliun)

Dari gambar 1.4 diatas dapat dilihat nilai produksi di Kabupaten/Kota Provinsi Tahun 2018-2022. Nilai produksi yang diukur oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar Harga Berlaku Kab/Kota Provinsi Banten bersifat fluktuatif. Yang memiliki nilai produksi tertinggi terjadi pada Kota Tangerang yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp161,369 Triliun dan tahun 2022 sebesar Rp182,409 Triliun. Tingginya PDRB di Kota Tangerang didukung oleh keberadaan industri pengolahan di daerah ini. Namun faktor produksi pada perekonomian masing-masing daerah turut menentukan perkembangan nilai PDRB per kapita yang berbeda-beda.

Faktor lainnya yang dapat memberi pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Claribel Birgitta, 2021). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ialah rasio perbandingan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dengan jumlah penduduk dalam

kategori usia kerja (15 tahun keatas). Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula penawaran pasokan tenaga kerja (*labour supply* / penawaran tenaga kerja) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Gambar 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kab/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Persen)

Dilihat pada Gambar 1.5 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kab/Kota Provinsi Banten. Selama periode tahun 2018-2022 TPAK di Provinsi Banten bersifat fluktuatif. Hampir setiap tahun memiliki persentase di atas 60%. Terlihat bahwa pada tahun 2020 TPAK di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu 69,97 % atau meningkat sebesar 5,6 % dari tahun sebelumnya. Namun daerah yang memiliki TPAK terendah yaitu Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 karena mengalami

penurunan sebesar 60,57 %. Menurut Wahidin Halim selaku Gubernur Banten, mengatakan bahwa selain angkatan kerja yang terus bertambah, Provinsi Jawa Barat dan Banten menjadi tujuan utama para lulusan dan pelajar yang mencari pekerjaan, Provinsi Banten memiliki banyak industri yang menjadi alasannya. Selain lulusan SMA/SMK setempat yang mencari pekerjaan di sana, ada juga yang datang dari luar. Hal ini justru meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan meningkatkan pengangguran, karena industri tidak dapat menyerap seluruh angkatan kerja yang ada (www.kabarBanten.com).

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten 2018-2022”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pendidikan, Nilai Produksi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pendidikan, Nilai Produksi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara bersama-

sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2022?

3. Bagaimana elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja sebagai akibat perubahan Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pendidikan, Nilai Produksi serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pendidikan, Nilai Produksi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga di kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pendidikan, Nilai Produksi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga di kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja sebagai akibat perubahan Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pendidikan, Nilai Produksi serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini meningkatkan pengetahuan mengenai penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
2. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan informasi dalam mengembangkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan dan informasi kepada masyarakat terutama tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
4. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu beban referensi guna penelitian yang sejenis.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten dengan menggunakan data sekunder yang diakses melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian digambarkan sebagai berikut:

